

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 di Kabupaten Bantul

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bantul

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebanyak 921.263 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 459.459 jiwa dan wanita sebanyak 461.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.818 jiwa/km². Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat 481.422 jiwa, sementara tahun 2011 menjadi 476.567 jiwa. Jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebanyak 30.139 jiwa, turun menjadi 29.219 jiwa pada tahun 2011.

2. Visi Misi Serta Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

a. Visi:

Visi Kabupaten Bantul adalah "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis." Pengertian visi tersebut yaitu bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, *ijo royo-royo*, tertib, aman, sehat, asri, sejahtera, demokratis, dan agamis akan diwujudkan melalui misi.

b. Misi:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif *gender*;
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

3. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bantul

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2011 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu tumbuh 5,27% dengan nilai tambah mencapai Rp10,03 trilyun atas dasar harga berlaku dan Rp4,18 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000. Membaiknya ekonomi daerah dikarenakan semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan andil terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHRT) sedangkan andil terkecil diberikan oleh sektor

Kontribusi sektor, menurut harga konstan masih didominasi oleh 3 besar lapangan usaha, yaitu pertanian (20,76%); perdagangan, hotel, restoran (20,21%); dan industri pengolahan (16,29%). Hal tersebut terungkap dalam ekspose PDRB triwulan IV tahun 2011 yang terselenggara belum lama ini. Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Bantul pada tahun 2011 mencapai Rp10.882.642,- atas dasar harga berlaku. Adapun inflasi di Bantul sebesar 3,73%, angka ini lebih rendah dari inflasi kota Yogya yang mencapai 3,88%, maupun nasional yang sebesar Rp3,79%. Untuk melihat tabel pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Bantul, maka dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel I

Tabel Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011

No	Tahun	Harga		Konstan Tahun 2000	
		Nilai (Juta RP)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta RP)	Pertumbuhan (%)
1	2010	9.076.401	10,95	3.967.948	4,97
2	2011	10.025.776	10,46	4.176.867	5,27

Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2012

Apabila dilihat dari pergeseran sektoral, empat sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDRB berturut-turut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan dari 23,87% pada tahun 2010 menjadi 22,76% pada tahun 2011; sektor perdagangan

hotel, dan restoran naik dari 19,90% pada tahun 2010 menjadi 20,22% pada tahun 2011; sektor industri pengolahan sebesar 16,33% pada tahun 2010 menjadi 16,29% pada tahun 2011; dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan dari 13,37% pada tahun 2010 menjadi 13,51% pada tahun 2011. Koefisien *Gini Ratio* merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk.

Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil. Koefisien Gini tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Koefisien Gini tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan PDRB, dan juga kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk dapat melihat data pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber perekonomian sebuah

Tabel II

Tabel Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2012

No	Iuran	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian %
A	Pendapatan	1.165.047.061.158,75	1.180.550.742.432,41	15.503.681.273,66	101,33
1	Pendapatan Asli Daerah	115.321.898.743,75	128.900.086.173,41	13.578.187.429,66	111,37
2	Dana Perimbangan	710.056.724.015,00	717.123.249.859,00	7.066.525.844,00	101,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	339.668.438.400,00	334.527.406.400,00	(5.141.032.000,00)	98,49

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul, data sementara per 8 Maret 2012

5. Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Perekonomian, Keuangan dan Anggaran Daerah

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, mengenai kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Bantul pada prinsipnya terfokus kepada pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktifitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Dalam upaya kinerja birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah dan anggaran daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten pada prinsipnya bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah dalam peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Bantul.
- b) Memiliki kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada

- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- d) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- e) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS-daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
- f) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
- g) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- h) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- j) Pengembangan sistem informasi keuangan untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyediaan informasi sehingga

memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapat informasi.

6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bantul Oleh Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bantul bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan keseimbangan perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

a. Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul, ada keterlibatan paradigma ekonomi dalam teori pilihan publik untuk mengkaji suatu kebijakan sebagai upaya yang baik dalam proses politik agar penerapan kebijakan benar-benar memberikan manfaat

Intinya, *public choice* adalah metode ekonomi yang diupayakan untuk diterapkan dalam ruang administrasi publik.

Dalam peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Bantul, dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah pada dasarnya bertumpu pada dua hal, yaitu rasionalitas ekonomis dan rasionalitas birokrasi. Rasionalitas ekonomi setidaknya memberikan kontribusi perlunya efisiensi anggaran pembangunan guna mencapai sasaran dan sesuai dengan analisa masalah dan kebutuhan khususnya dalam peningkatan perekonomian.

Peran Birokrasi Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Bantul pada dasarnya ada 4 (empat) peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. *Enterpreneur*. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2. *Koordinator*. Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam perannya sebagai *coordinator*, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi

bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
4. Stimulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Ada tiga (3) implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bantul sebagai kinerja birokrasi pemerintah terhadap peningkatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bantul yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendalam antara keduanya dan konsekuensi akhir dari

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah Kabupaten Bantul, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah Kabupaten Bantul yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan daerah.

Terkait dengan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam peningkatan perekonomian dari sektor

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah Kabupaten Bantul menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya jika startegi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bantul, maka perekonomian daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bantul yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi serta membaiknya ekonomi daerah, maka prospek perekonomian pada tahun 2011-2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2009 mencapai 4,18% diharapkan meningkat menjadi 5,66% pada tahun 2011-2015. Seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi domestik, proses rekonstruksi gempa yang telah selesai, dan dampak pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah;
- b) Rata-rata inflasi dalam satu dasawarsa terakhir sebesar 6,22% selanjutnya diharapkan pada tahun 2011-2015 sebesar 5-6%. Kondisi ini diasumsikan tidak terjadi peristiwa yang memicu

kegiatan ekonomi dan kondisi ketersediaan maupun permintaan barang/jasa akan stabil;

- c) Indeks Gini diharapkan membaik dari 0,2458% pada tahun 2011 menjadi 0,2454% pada tahun 2015;

7. Peningkatan Perekonomian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional di suatu daerah, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi disebuah daerah diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dan dukungan pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi dan sekaligus memberikan manfaat bagi industri dalam negeri. Berkaitan dengan hal itu, dalam Kawasan Ekonomi

Kawasan Industri lebih bagi UMKM dan koperasi agar dapat

mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung Pelaku Usaha lain.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan ekonomi khususnya di sebuah daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya yang ada di Kabupaten Bantul.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang pengaturan ekonomi khusus pada suatu daerah kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu di daerah.

Fungsinya adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata

Kawasan Ekonomi Khusus menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan perekonomian di daerah Kabupaten.

B. Hambatan Serta Upaya Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Daerah Kabupaten Bantul

1. Hambatan dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Kabupaten Bantul

Hambatan dalam peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi makro, sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Pertumbuhan sektor industri yang masih belum pulih akibat gempa di Kabupaten Bantul yang mengakibatkan terganggunya sektor perekonomian.
- c) Dari sisi financial, pengaruh krisis finansial global pada pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

- d) Pergeseran nilai budaya dan kearifan lokal akan menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi lokal.

Sedangkan hambatan dalam sisi keuangan daerah kabupaten Bantul adalah:

- a) Adanya Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah;
- b) Penurunan objek retribusi daerah ;
- c) Rendahnya kapasitas fiskal;
- d) Tingginya porsi belanja pegawai terhadap APBD;
- e) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- f) Predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan daerah belum tercapai;
- g) Rendahnya kesadaran wajib pajak.

Kedua hal tersebut diatas yang pada dasarnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul adalah dari kelemahan sektor perekonomian dan keuangan seperti yang telah di sebutkan diatas, bahwa kelemahan di berbagai sektor diatas sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Bantul

2. Wujud Kegagalan Pemerintah Daerah

Dalam perekonomian sebuah daerah, ada faktor-faktor penyebab kegagalan pemerintah dalam peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a) Campur tangan pemerintah yang sering menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu.
- b) Pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya. Sering kebijakan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah khususnya dibidang perekonomian.
- c) Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar dari pada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
- d) Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. Misalnya saja, pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dimaksudkan agar yang miskin dapat menyewa rumah secara murah. Ternyata pengembang mengalihkan investasinya pada proyek lain.
- e) Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan

- f) Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu (*vested interest*) dan mungkin memiliki kepentingan sendiri (*self interest*), serta sering bertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- g) Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau *rent seeking behavior*. Hal-hal di atas akan menyebabkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang perekonomian. Dengan demikian seyogyanya pemerintah berhati-hati untuk tidak terlalu jauh mengintervensi hal-hal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, kecuali pemerintah telah memikirkan akibat kebijaksanaannya secara cermat.

3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Beberapa upaya dan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas adalah:

- a) Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi,
- b) Peningkatan produksi dan daya beli,
- c) Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi,
- d) Peningkatan produksi serta pengembangan agribisnis dan

- e) Pembatasan alih fungsi lahan produktif,
- f) Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani,
- g) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi,
- h) Pemberdayaan IKM, koperasi dan perdagangan,
- i) Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan,
- j) Pelestarian aset seni budaya daerah,
- k) Perbaikan mutu kawasan,
- l) Peningkatan SDM,
- m) Memperluas lapangan pekerjaan,
- n) Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja,
- o) Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahteraan rakyat,
- p) Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak,

Arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan,
2. Peningkatan SDM,
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,
4. Penanganan desa rawan pangan,
5. Meningkatkan produktivitas dan perluasan areal

6. Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis dan agropolitan,
7. Perbaiki struktur lahan,
8. Pemberian insentif.

Kemudian upaya peningkatan perekonomian melalui sektor pajak yang mendukung adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

- a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada.
- b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi.
- c. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Bantul adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, Kabupaten Bantul menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut tertentu.

Dari hal ini diharapkan akan mampu memberi kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah masih merupakan sumber PAD yang utama di Kabupaten Bantul tahun 2007-2010 karena mampu memberikan kontribusi tertinggi pada PAD. Mulai 1 Januari tahun 2010 diberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

4. Analisis Terhadap Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Bantul

Melihat hasil penelitian tentang kinerja birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul terhadap upaya peningkatan perekonomian daerah pada dasarnya dalam pelaksanaannya berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang memerlukan penyesuaian dan perubahan (reform) atas manajemen keuangan pemerintah daerah yaitu

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berlaku mulai dari sistim penganggaran daerah, Misalnya Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Ekonomi Khusus. Penerapan sistem dan upaya peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Bantul juga tidak terlepas dari sistim akuntansi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan. Perubahan dimaksud penting untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintahan Daerah.

Penelitian terhadap upaya peningkatan ekonomi di Kabupaten Bantul oleh birokrasi pemerintah menunjukkan adanya peningkatan menurut pendapatan daerah dari berbagai sektor. Namun jika dibandingkan dengan pembelanjaan daerah dan pembangunan, maka perekonomian Kabupaten Bantul pada dasarnya menggambarkan kondisi yang stabil.

Untuk mengetahui peran birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dari berbagai sektor, maka dapat diketahui sektor ekonomi apa saja yang menjadi objek dalam peningkatan perekonomian secara umum, yang diantaranya adalah:

- a. Sektor Pertanian,
- b. Sektor Pariwisata,
- c. Sektor Industri dan Perdagangan,
- d. Pengelolaan Sektor pajak daerah dan retribusi daerah

- e. Lain-lain yang merupakan sumber perekonomian Kabupaten Bantul.

Berbagai sektor tersebut diatas merupakan objek yang diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengelolah secara efektif guna penyelenggaraan perekonomian daerah. Dari beberapa indikator ekonomi daerah tersebut maka sesuai dengan penelitian penulis di Daerah Kabupaten Bantul, maka dapat dijelaskan bahwa sektor ekonomi yang menonjol dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Bantul adalah sektor pariwisata dan pertanian.³⁰

Sesuai dengan hasil survei dan wawancara dengan Kasubbid Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai potensi ekonomi yang besar, yaitu:

- a) Di sektor industri terutama pada pengelolaan hasil pertanian dan kerajinan tangan serta industri kecil rumah tangga,
- b) Sektor perdagangan terutama untuk komoditas hasil pertanian skala regional,
- c) Sektor pertanian terutama pada tanaman bahan makanan,
- d) Sektor Pariwisata.

Dalam hasil perekonomiannya, sektor unggulan tersebut belum tergali dengan baik oleh pemerintah daerah, terutama di sektor industri

yang berskala besar dan bahan setengah jadi, di sektor perdagangan karena kurang kontinyu, kurang tepat waktu dan kualitas masih belum bagus, dan di sektor pertanian terutama hasil tanaman makanan, dan usaha daerah lainnya.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa hal sebagai pertimbangan atau kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang belum tergali, antara lain:

1. Kebanyakan sektor-sektor ekonomi masih belum teridentifikasi dengan baik oleh Pemda Kabupaten Bantul sebagai sektor unggulan;
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pemda Kabupaten Bantul dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi daerah;
3. Keterbatasan dana untuk menggali sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar dalam menunjang perekonomian daerah;
4. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana penunjang yang ada di daerah.

Untuk mengurangi kendala-kendala tersebut, maka perlu ada kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bantul antara

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana wilayah, seperti: jalan, komunikasi, listrik dan sistem transportasi; agar memperlancar akses ke pasar regional maupun internasional;
- 2) Kerjasama dan mengundang investor untuk mengelola sektor-sektor ekonomi tersebut;
- 3) Peningkatan keamanan dan pengamanan lingkungan sosial masyarakat;
- 4) Perbaikan dan penyebaran sistem teknologi, informasi dan transparansi;
- 5) Pemberian subsidi dan insentif dalam rangka pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang potensial;
- 6) Pengumpulan dan pemupukan PAD untuk mendanai kesiapan-kesiapan tersebut diatas. Selain kesiapan di tingkat Pemda sendiri, maka untuk mendorong investasi masuk di wilayah tersebut perlu ada kesiapan, antara lain:
 - a) Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah Kabupaten Bantul;
 - b) Perbaikan sistem informasi mengenai potensi sumber daya alam bagi investor asing maupun domestik;
 - c) Mengundang investor untuk melakukan *road show* ke wilayah-wilayah potensial di Kabupaten Bantul.

- d) Memberikan jaminan keamanan bagi investor maupun investasinya;
- e) Mempermudah sistem dan prosedur perizinan bagi investasi yang masuk di wilayah tersebut;
- f) Pengembangan SDM pemerintah Daerah dan Birokrasi melalui peningkatan kualitas dengan cara: peningkatan jenjang pendidikan, penegakkan sistem reward dan *punishment*, peningkatan keahlian dan ketrampilan, khususnya dalam bidang pengelolaan perekonomian daerah